



DIREKTORAT JENDERAL  
PERIMBANGAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL DAERAH

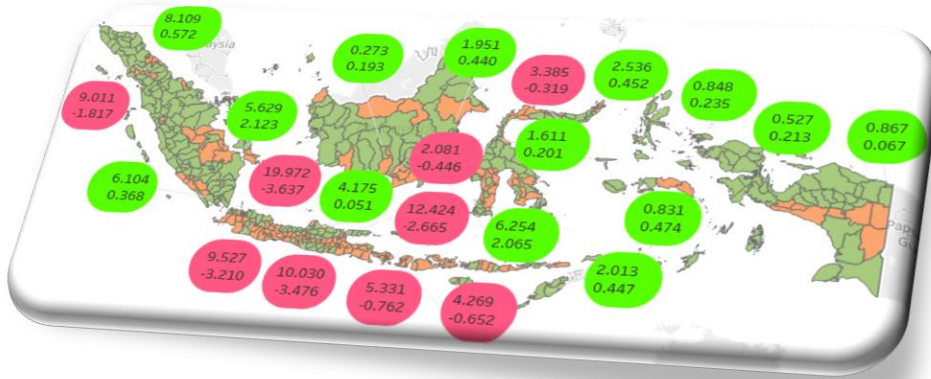


Periode 15 s.d. 26 Februari 2021

Astera Primanto Bhakti • Harry Z. Soeratin • Putut Hari Satyaka • Adriyanto • Bhimantara Widyajala • Agung Widiadi  
Subandono • Amrul Yusroni • Yadi Hadian • Jackwin Simbolon • Mulyono • Kurnia • Radies Kusprihanto Purbo • Miftah Chalamsa  
Adrian Kusuma Pratama • Purwandi Santoso • Arifudin Miftakhul Huda • Mario Agustino • Eko Arisyanto • Britany Alasen Sembiring  
Desy Puspita Anggraeni • Nabillah Rahma • Nadia Nurul Nisa • Narits Muhammad Syafruddin • Selma Syifa Khoirunnisa

# KINERJA PEREKONOMIAN DAERAH

## Perkembangan Tingkat Aktivitas Ekonomi di Daerah



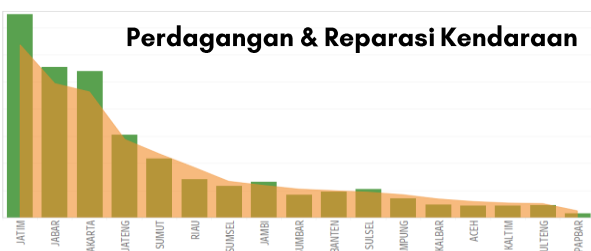
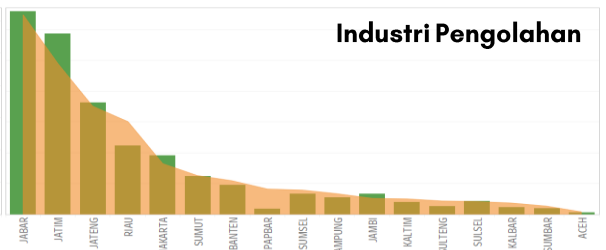
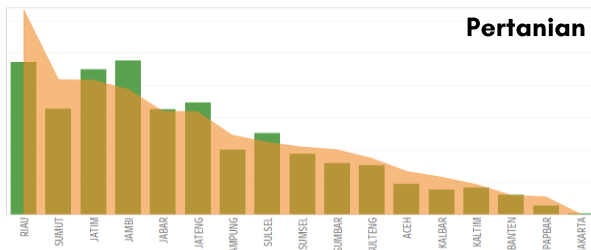
**Delta Luminosity Index 17 Jan - 12 Feb**

**Index 12 Feb Delta**

**Index NAIK dari 17 Jan**

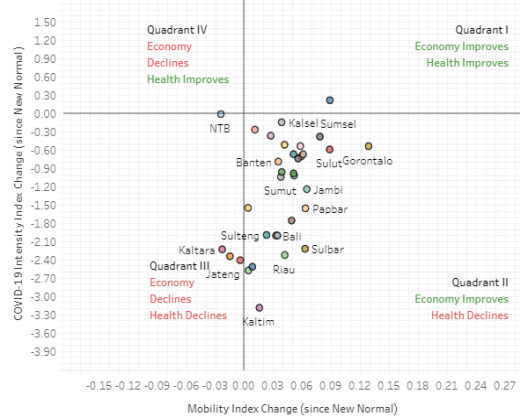
**Index TURUN dari 17 Jan**

Berdasarkan nilai *luminosity index*\* dalam periode 17 Januari - 12 Februari 2021, **aktivitas perekonomian** di sebagian besar Indonesia **mengalami peningkatan**, meskipun di sebagian wilayah **Jawa** relatif menurun. Ibu kota dengan **peningkatan** aktivitas ekonomi **tertinggi** adalah **Palembang** (3,51 menjadi 5,63), **Makassar** (4,19 menjadi 6,25), dan **Jambi** (4,22 menjadi 6,21). Sedangkan ibu kota provinsi yang mengalami **penurunan** aktivitas ekonomi **tertinggi** adalah **Jakarta** (23,61 menjadi 19,97), **Yogyakarta** (13,51 menjadi 10,03), dan **Bandung** (12,74 menjadi 9,53).



**Sektor Pertanian** mengalami **kenaikan** di **Riau, Sumut, dan Lampung**, namun **menurun** di **Jatim, Jambi, dan Jateng**. **Industri Pengolahan** mengalami penurunan, terdalam di **Jatim, Jateng, dan Jakarta**. **Perdagangan & Reparasi Kendaraan** terkontraksi, terdalam di **Jatim, Jabar, dan Jakarta**.

## Indeks Mobilitas Nasional dan Daerah (26 Februari 2021)

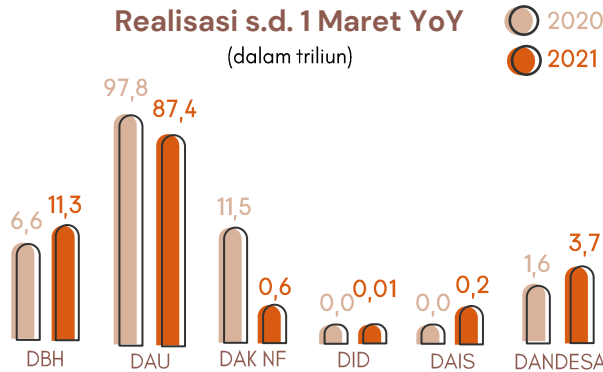


Berdasarkan nilai *mobility index*\* dalam periode 12 Feb - 26 Feb 2021, **aktivitas perekonomian nasional cenderung sedikit menurun** (-0,103 ke -0,100). Per 26 Feb 2021, hanya **Malut** yang masuk ke **Kuadrant I** (ekonomi dan kesehatan membaik), sementara **Jateng, NTT, dan Kaltara** masuk ke **Kuadrant III** (ekonomi dan kesehatan memburuk).

\*sumber: NASA dikutip Prospera, CSIS Indonesia

# KINERJA TKDD DAN APBD

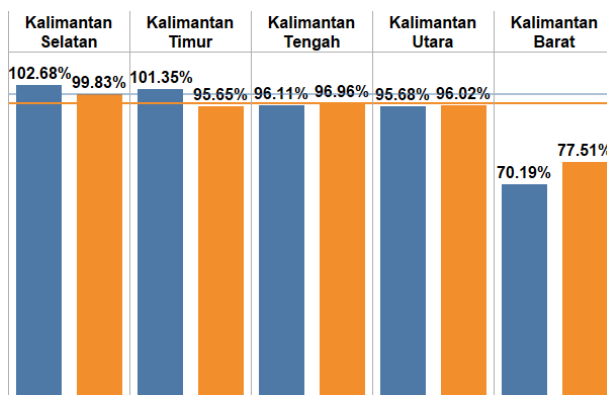
## Kinerja TKDD



Secara YoY, realisasi **Februari 2021** sebesar Rp103,25 T mengalami **penurunan 12,3%** dibandingkan realisasi Februari 2020 sebesar Rp117,68 T. **Penurunan terbesar** bersumber dari **DAK Nonfisik sebesar 94,4%** akibat adanya keterlambatan penetapan petunjuk teknis oleh K/L pengampu dana.

Realisasi BLT sebesar Rp229,7 M kepada 11.099 Desa.

## Kinerja APBD Kalimantan

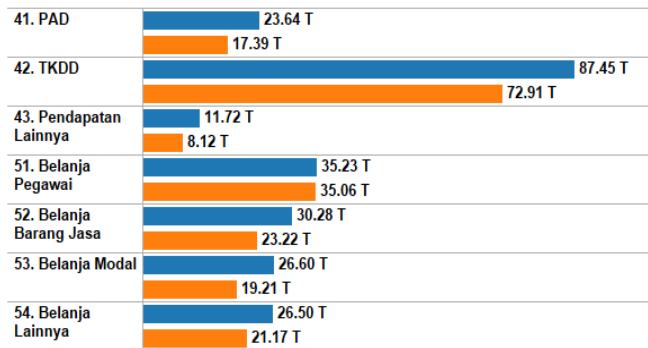


- Secara YoY, realisasi **pendapatan** di Kalimantan mengalami **penurunan 19,86%**, lebih tinggi dari penurunan **Nasional sebesar 11,84%**. Sedangkan **penurunan belanja** sebesar **16,82%** yang juga lebih tinggi dari penurunan **Nasional sebesar 12,23%**.

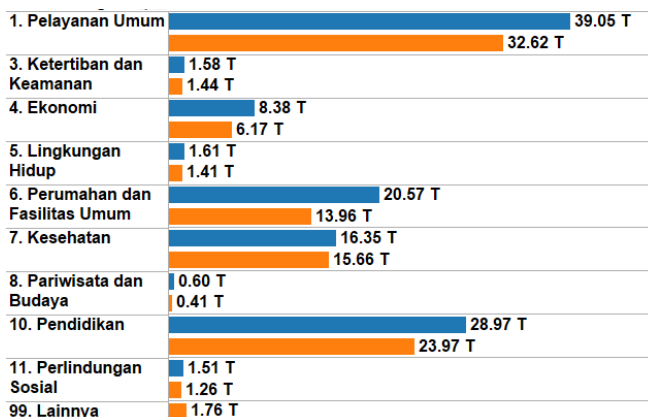
- Hanya Kalsel dan Kaltim** mempunyai **realisasi pendapatan** TA 2020 yang **lebih tinggi dari angka Nasional** sebesar **99,74%** dari APBD Penyesuaian. Sedangkan untuk **realisasi belanja**, **Kalsel dan Kalteng** mempunyai realisasi **di atas angka Nasional** sebesar **96,65%**.

- Salah satu sumber **penurunan** pendapatan adalah penurunan **PAD**, sebesar **26,42%**, terutama akibat **penurunan pajak daerah** yang **berbasis konsumsi**, seperti **Pajak Hiburan 62,58%**, **Pajak Hotel 46,33%**, **Pajak Restoran 35,56%**, **BBNKB 30,23%**, dan **PBBKB 15,44%**.

- Hampir **seluruh komponen belanja** mengalami **penurunan**, kecuali **Belanja Tak Terduga** **naik 6634,44%**, dalam rangka penanganan pandemi di 2020.



■ 2019  
■ 2020



- Seluruh belanja per fungsi** mengalami **penurunan** realisasi secara YoY. **Belanja Fungsi Kesehatan** mengalami penurunan terkecil, yaitu dari Rp16,35 T (2019) menjadi Rp15,66 T (2020) atau turun sebesar **4,22%**. Sedangkan belanja fungsi **Perumahan dan Fasilitas Umum** mengalami **penurunan yang dalam** sebesar **32,15%**.

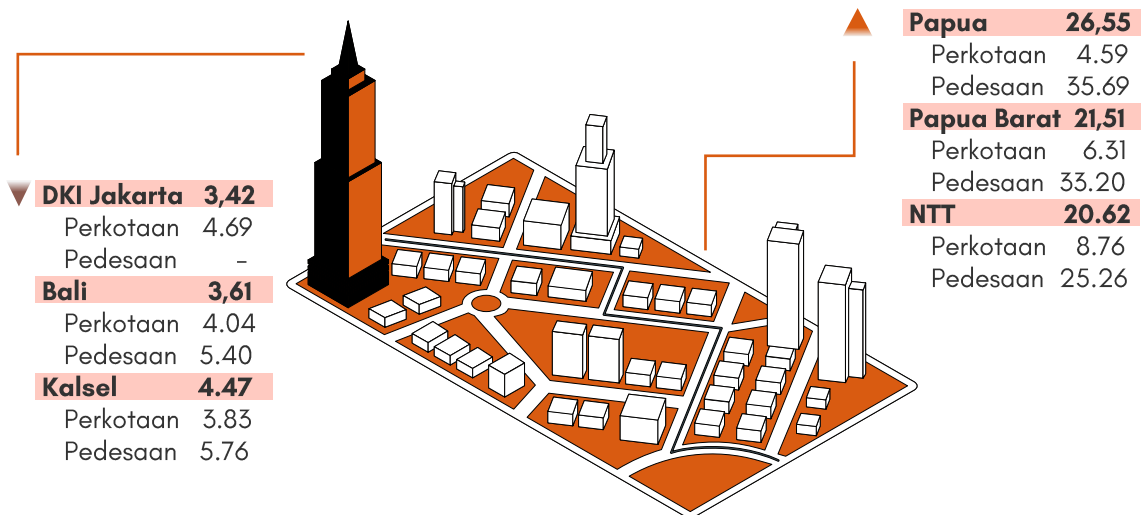
\*Data realisasi APBD 2020 dicetak tanggal 11 Februari 2021

# KINERJA PENGENTASAN KEMISKINAN DI TENGAH PANDEMI

## ► Tingkat Kemiskinan

Pada semester 2 tahun 2020, 10,19% penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan, naik dari angka bulan Maret 2020 yang berada di angka 9,78%.

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Daerah, dan Desa dalam membantu masyarakat untuk dapat bertahan dalam keadaan pandemi COVID-19, seperti Program Keluarga Harapan, BLT Desa, DID, dan Bansos yang berasal dari APBD.



Sumber : BPS.go.id (dalam persen)

## 4

## PENGENTASAN KEMISKINAN

## ► Program Keluarga Harapan (PKH)

merupakan salah satu program utama Pemerintah Pusat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Terdapat 4 tahap penyaluran bantuan pada Tahun 2020 dengan total penyaluran sebesar Rp24,2 Triliun. Untuk Tahap 4 atau tahap terakhir pada tahun 2020 telah disalurkan bantuan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total Rp7,6 Triliun.



Sumber : pkh.kemensos.go.id

# KINERJA PENGENTASAN KEMISKINAN DI TENGAH PANDEMI

## ► Bantuan Pangan Non Tunai / Kartu Sembako



Pagu APBN 2021  
**45,1 Triliun**



Sasaran BNPT /  
Kartu Sembako  
**18,8 juta keluarga**



Alokasi  
**200.000 / bulan**

## ► Kinerja BLT Dana Desa

Dengan pagu Dana Desa pada tahun 2021 sebesar Rp72 Triliun, Pemerintah Pusat mengarahkan penggunaannya untuk BLT Dana Desa sebesar Rp29,16 Triliun. Hingga akhir Februari 2021, total penyaluran BLT Dana Desa Rp229,75 milyar atau 6,58% dari pagu anggaran BLT Dana Desa Tahun 2021. Jumlah tersebut telah disalurkan ke RKD sebanyak 11.099 desa.

### Jumlah Kabupaten/Kota



### Jumlah Desa di Kabupaten/Kota



### Jumlah Desa Salur BLT ke RKD



### Nilai Salur BLT



Sumber : OMSPAN

## ► Belanja Bantuan Sosial APBD

Tidak hanya di Pusat, Pemerintah Daerah juga melakukan upaya *countercyclical* melalui Belanja Bantuan Sosial yang berasal dari APBD. Berdasarkan data realisasi sementara per 26 Februari, Pemerintah Daerah telah merealisasikan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp11,8 Triliun.

### TOP 5

<b>DKI Jakarta</b>	4.831,50 M
<b>Kab. Donggala</b>	485,44 M
<b>Kota Palu</b>	409,58 M
<b>Kab. Sigi</b>	367,43 M
<b>Prov. Jawa Barat</b>	206,08 M

### BOTTOM 5

<b>Kab. Pakpak Bharat</b>	0,31 M
<b>Kab. Tana Toraja</b>	0,18 M
<b>Kota Batam</b>	0,15 M
<b>Kota Tidore Kepulauan</b>	0,14 M
<b>Kab. Boalemo</b>	0,12 M

Sumber : SIKD

# EDITORIAL

## Optimalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial: Tantangan dan Peluang

*“Apakah keadaanmu hari ini lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu”*

merupakan pertanyaan yang penting untuk melihat bagaimana kualitas hidup masyarakat semakin baik dibandingkan sebelumnya. Hal ini menjadi tantangan utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup warganya. Namun, di saat keadaan sulit tantangan pemerintah berubah menjadi bagaimana mempertahankan kualitas hidup warganya, misalnya ketika menghadapi wabah pandemi Covid-19 seperti saat ini. Pandemi berdampak pada meningkatnya penduduk miskin dan pengangguran menuntut pemerintah untuk beradaptasi dan melaksanakan kebijakan yang cepat, salah satunya adalah kebijakan jaring pengaman sosial.

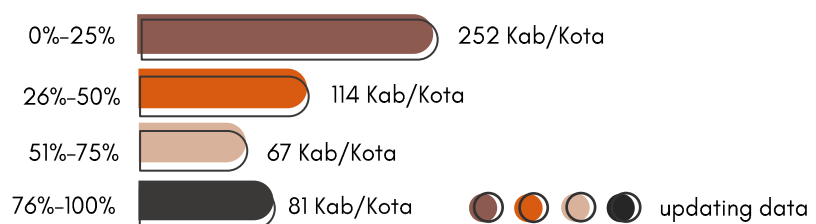
Terdapat berbagai jenis dan skema pendanaan untuk program jaring pengaman sosial yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, antara lain **Program Keluarga Harapan (PKH)**, **Kartu Sembako**, **Bantuan Sosial Tunai (BST)** dan **Bantuan Sembako Jabodetabek**. Di daerah, masing-masing provinsi dan kabupaten/kota juga memberikan bantuan sosial dengan jenis yang bervariasi. Pemerintah Desa juga memberikan bantuan sosial dalam bentuk **Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa**. Dengan bervariasinya program perlindungan sosial tersebut maka pemberian bantuan sosial harus didasarkan pada data dasar yang sama supaya tepat sasaran dan menghindari duplikasi penerima bantuan.

### ► Tantangan

Data dasar yang digunakan dalam pemberian bantuan sosial secara nasional adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin) Kementerian Sosial. DTKS, sebelumnya dinamakan Basis Data Terpadu (BDT), merupakan informasi tentang status sosial ekonomi dan demografi dari 40% penduduk di Indonesia yang dihitung mulai dari yang paling rendah status kesejahteraannya dengan menggunakan Metode *Proxy-Mean Testing (PMT)*. Oleh karena perhitungan DTKS mencakup tingkat kesejahteraan secara nasional, maka sebaran persentase penduduk 40% tersebut tidak sama atau bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dalam perhitungan DTKS, terdapat beberapa indikator data yang terkait DTKS yaitu data non aktif, data usulan baru, dan data perbaikan DTKS dengan basis perhitungan data berdasarkan rumah tangga, keluarga dan anggota rumah tangga. Dalam pengisian DTKS, tanggung jawab pemutakhiran Data Terpadu diserahkan kepada Pemda. Untuk membantu proses pengelolaan data, Kemensos mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

Namun demikian, **tantangan utama** dari tata kelola sistem ini adalah adanya ketergantungan terhadap pemda. Meskipun Pusdatin Kemensos melakukan pemutakhiran DTKS dua kali setahun pada bulan April dan Oktober, namun pemutakhiran tersebut adalah berdasarkan isian data yang dilakukan oleh kabupaten/kota. Pada pemutakhiran DTKS Oktober 2020, perkembangan keaktifan kabupaten/kota pada finalisasi DTKS menunjukkan sebanyak 47 kabupaten/kota tidak aktif sama sekali, 62 daerah hanya finalisasi periode sebelumnya, dan 402 kab/kota melaksanakan finalisasi terupdate.

**Dari sisi persentase keaktifan Kabupaten/kota pada finalisasi DTKS, sebagian besar daerah keaktifannya sangat rendah:**



Rendahnya progress updating tersebut diduga karena adanya berbagai hambatan di daerah, baik pendanaan maupun SDM sehingga perlu ada kebijakan untuk mendorong percepatan updating DTKS.

# EDITORIAL

## ► Existing Strategy

Saat ini, berbagai strategi ditempuh untuk melakukan percepatan updating DTKS.

Strategi pertama adalah melalui pemadanan data antara DTKS dengan data Dukcapil Kemendagri. Dari jumlah DTKS yang ada, Kementerian Sosial melakukan pemadanan DTKS dengan data Dukcapil Kemendagri dimana 83,6 juta jiwa sudah padan dengan dukcapil (85,2%) dan 14,4 juta belum padan (13,8%). Adapun kondisi DTKS per Januari 2021 terdiri dari 27,7 juta rumah tangga, 29,7 juta keluarga, 96,96 juta individu, dan 621.618 jiwa PPKS di luar rumah tangga. Disamping itu, terdapat pula 1.535 kepala keluarga komunitas adat terpencil, 49.624 jiwa PSKS perorangan dan 38.845 kelompok/Lembaga.



Perbaikan data merupakan tugas bersama yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, strategi berikutnya adalah dengan mengeluarkan SKB 3 Menteri, yaitu SKB Menteri Keuangan, Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri mengenai Dukungan Percepatan Pemutakhiran DTKS oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai tindak lanjut atas SKB tersebut, Kementerian Keuangan akan memberikan *reward* dan *punishment* bagi Pemda dalam pelaksanaan updating DTKS. Dalam rangka memberikan insentif kepada daerah, Pemerintah memberikan DID kepada daerah yang berkinerja baik dengan salah satu kriterianya adalah perbaikan DTKS. Dari aspek *punishment*, Pemerintah memberikan sanksi penundaan Dana Transfer ke Daerah kepada daerah yang tidak melakukan updating DTKS sesuai ketentuan.

## ► Rekomendasi

Meskipun beberapa strategi telah dilakukan, mengingat pentingnya DTKS, baik itu saat ini maupun ke depan, berbagai upaya terobosan perlu selalu dilakukan. Rekomendasi pertama adalah peningkatan kualitas DTKS antara lain dengan menetapkan parameter kemiskinan yang lebih akurat dengan melibatkan perguruan tinggi dan mengakomodasi konteks lokal dan karakteristik daerah. Pelibatan perguruan tinggi diperlukan sebagai *quality assurance* data. Strategi berikutnya adalah dengan melaksanakan konsolidasi dan integrasi DTKS dengan data kementerian/Lembaga lain supaya data lebih lengkap dan terpadu.

Selanjutnya, peran pemda dalam updating DTKS harus didorong dan diperkuat dengan meminta Pemda melakukan updating data secara periodik. Untuk itu, kualitas SDM pengolah data di daerah perlu ditingkatkan. Peningkatan kualitas SDM pengolah data ini dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan maupun kerjasama dengan lembaga lain misalnya BPS.

Langkah lain yang harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kualitas data adalah dengan melakukan monitoring dan perbaikan data melalui koordinasi dan evaluasi pelaksanaan penyaluran bansos. Berbagai langkah dan strategi tersebut diperlukan guna mendukung semakin baiknya penyediaan DTKS yang dapat diandalkan. Salah satu yang dapat direkomendasikan adalah dengan menggunakan *mobile apps* yang terhubung dengan sistem DTKS. Dengan adanya *mobile apps* ini laporan akan dapat disampaikan oleh petugas lapangan secara lebih cepat, sehingga proses evaluasi dapat dilaksanakan tanpa menunggu laporan disampaikan secara manual.

# INOVASI DAERAH

## Inovasi Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek

**Kabupaten Trenggalek** merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Meskipun Kabupaten Trenggalek bukan kabupaten termiskin di provinsi Jawa timur, akan tetapi Trenggalek cukup tertinggal dibandingkan Kabupaten/Kota Jawa Timur lainnya. Hingga tahun 2020, jumlah penduduk miskin Kab. Trenggalek mencapai 81.060 jiwa (11,62%). Persentase kemiskinan di Trenggalek memang mengalami penurunan dari sebelumnya 12,4% di tahun 2014, namun persentase kemiskinan tersebut masih diatas rata-rata angka kemiskinan Jawa Timur (11,09%) dan Nasional (9,78%).

Dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan tersebut, Pemda Trenggalek terus bekerja keras memberikan perhatian lebih kepada warganya yang masih hidup di bawah kemiskinan. Kerja keras tersebut perlahan mulai memberikan hasil, dimana warga miskin di Trenggalek kini memiliki akses yang lebih baik dalam kesehatan dan program pemberdayaan ekonomi. Jika di banyak daerah lain terdapat pelayanan terpadu satu pintu bagi investor, maka Pemda Trenggalek melakukan inovasi dengan memberikan pelayanan terpadu bagi warga miskin. Pelayanan tersebut diberikan dengan mempermudah akses warga miskin untuk berobat dan bersekolah, dimana melalui pelayanan tersebut diharapkan warga tersebut dapat secara perlahan memperbaiki kondisi ekonomi mereka.

Berkat kerja keras dan inovasi dalam upaya pengentasan kemiskinan tersebut, Kabupaten Trenggalek berhasil meraih penghargaan **Piala Emas Good Practice Awards - Otonomi Awards (OA) Tahun 2018** dari Mendagri dan **WOW Service Excellence** dari Mark Plus. Beberapa inovasi Trenggalek yang dilakukan pada program penanggulangan kemiskinan tersebut adalah:



### 1 Program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK)

Program ini bertujuan untuk memanejemeni masalah-masalah kemiskinan di Trenggalek menjadi terpadu dalam satu program. Gertak merupakan salah satu program untuk penanggulangan berbagai persoalan sosial dengan memanfaatkan Dana Non APBD, dimana pemda menggandeng Baznas untuk menggalang dana dari zakat, infak dan sedekah. Hasilnya, Baznas mampu mengumpulkan zakat, infak, sedekah sebesar kurang lebih Rp 400 juta perbulan atau sebesar Rp4,8 M di tahun 2019.

Dana tersebut langsung digunakan untuk kegiatan pengentasan kemiskinan dan kerentanan seperti pelayanan kesehatan dengan segera, mendaftarkan dan membayarkan premi asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum terjangkau Kartu Indonesia Sehat (KIS), hingga bedah rumah.

### 2 Program penanganan kemiskinan berbasis data terpadu

program penanganan kemiskinan di Trenggalek dilaksanakan secara tertata dan sistematis didukung perangkat lunak, perangkat keras, sumberdaya manusia dengan didukung basis data yang baik. Untuk mempermudah pelayanan dan ketepatan penerima manfaat bantuan sosial, didirikan Posko Gertak yang merupakan tempat pelayanan terpadu bagi warga miskin, dengan petugas dari berbagai instansi, mulai dari Baznas, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta beberapa instansi lainnya dan dibantu oleh relawan yang diberi nama Pasukan Pink (relawan yang bekerja tulus tanpa digaji). Laporan masyarakat yang masuk, diverifikasi secara data dan juga diverifikasi di lapangan oleh pasukan pink yang bersifat independen untuk melakukan pembuktian.

*Lesson learned dari keberhasilan Trenggalek...*



# INOVASI DAERAH

## ▶ Lesson Learned Keberhasilan Trenggalek

### Perlunya Menggalang Koordinasi,

adalah mustahil mengatasi kemiskinan tanpa terjalinya kerjasama antar sektor dan antar pemangku kepentingan. Kerjasama ini berupa koordinasi untuk membentuk sinergi kebijakan dan mengkonsolidasikan sumber daya dalam mengatasi akar persoalan kemiskinan yang pada umumnya kompleks

### Menerapkan Kepemimpinan,

kinerja kebijakan pemerintah daerah ditentukan oleh kualitas kepemimpinan dan keteladanan

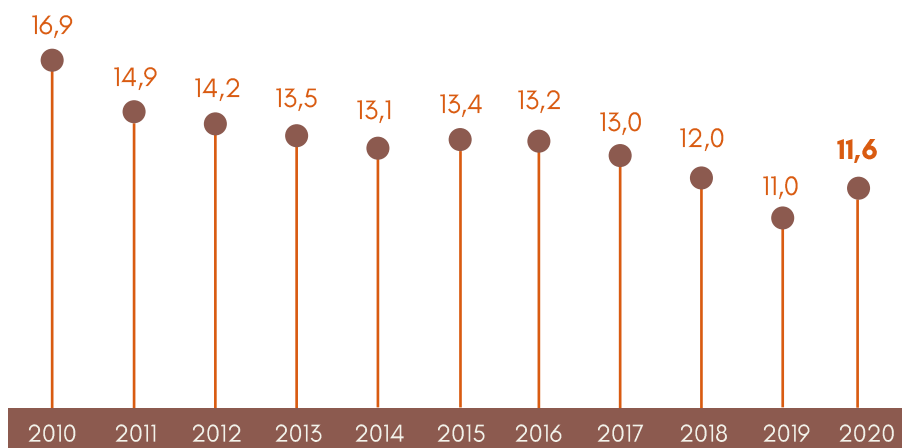
### Membangun Struktur dan Kapasitas,

program pengentasan kemiskinan harus mampu memobilisasi keterlibatan seluruh sektor terkait untuk saling mendukung di dalam struktur kelembagaan.

## ▶ Tabel perbandingan persentase penduduk Miskin Kab. Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur 2014-2020

Daerah	Persentase Penduduk Miskin						
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Kabupaten Trenggalek	11,62	10,98	12,02	12,96	13,24	13,38	13,1
Jawa Timur	11,09	10,20	10,98	11,2	12,05	12,34	12,4

## ▶ Perkembangan Persentase Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Trenggalek, 2010-2020



Sumber : Susenas 2010 - 2020

# KABAR DAERAH

## KAB. BIREUEN

Angka kemiskinan di Bireuen pada awal tahun 2018 mencapai 14,08%, sedangkan data tahun 2020 angka kemiskinan menurun menjadi 13,02%. Program yang memberikan dampak besar terhadap penurunan angka kemiskinan, antara lain program *Grand Desain Alternatif Development (GDAD)* kerjasama dengan BNN dan lembaga lainnya. Program tersebut yang telah berlangsung beberapa tahun berupa bantuan penanaman jagung, memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan juga meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain itu, Pemkab Bireuen juga membantu warga miskin baik melalui sumber Dana Desa maupun APBD Bireuen.

<https://aceh.tribunnews.com/>

## KOTA YOGYAKARTA

Pemkot Yogyakarta menyiapkan tiga strategi untuk menekan angka kemiskinan. Ketiga kebijakan yang akan diterapkan, di antaranya menekankan kembali program "Yogyakarta untuk Yogyakarta". Program ini dilakukan, misalnya membeli barang di warung tetangga atau mempekerjakan warga di lingkungan sekitar. Pasar tani yang menghubungkan kampung sayur dan e-warong. Kemudian, warga penerima bantuan dari pemerintah bisa membeli di e-warong tersebut. Program kedua, untuk mengurangi beban masyarakat, dilakukan, salah satunya dengan menambah titik wi-fi publik di wilayah berbasis RW. Program Ketiga, melakukan pengawasan rutin distribusi dan harga bahan pokok.

<https://www.merdeka.com/>

## KAB. LAMPUNG BARAT

Pemkab Lampung Barat berkomitmen untuk mengoptimalkan program penanggulangan kemiskinan melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan UMKM. Di bidang pendidikan, program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui penyediaan biaya penyelenggaraan pendidikan merata. Di bidang kesehatan, diberikan jaminan kesehatan penduduk miskin di luar kuota, jampersal, rehabilitasi rumah tidak layak huni, bantuan sembako untuk lansia dari keluarga kurang mampu. Sebagai bahan evaluasi, maka perlu didukung dengan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

<https://m.lampost.co/>

## PROVINSI ACEH

Angka kemiskinan di Aceh tahun 2020 lalu meningkat 0,42% dibandingkan 2019. Pemprov Aceh merespon dengan mengeluarkan enam strategi untuk menurunkan angka kemiskinan di Aceh diantaranya, menekan pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, meningkatkan SDM, meningkatkan transaksi ekonomi, menjaga stabilitas harga pangan, dan cepat tangani dampak bencana alam. Pengeluaran perlu ditekan agar mereka tak boros membelanjakan pendapatannya ke belanja-belanja nonproduktif seperti rokok. Selain itu, mengupayakan pendapatan masyarakat miskin meningkat melalui peningkatan keahlian. Cara lain untuk membantu masyarakat miskin adalah melalui program padat karya dan basiswa.

<https://aceh.tribunnews.com/>

## KAB. KLUNGKUNG

Pemkab Klungkung memiliki beberapa program inovasi guna membantu masyarakat di kala pandemi. Salah satu programnya bernama "Yowana Gema Santi". Yowana Gema Santi merupakan agen perubahan di masing-masing desa untuk mendata ke lapangan dan membedah dimana ada orang miskin, kenapa ada orang miskin dan bagaimana cara memberdayakan untuk mau bekerja. Program Inovasi lainnya, yakni Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS). Program TOSS memiliki metode yang dapat mengubah sampah menjadi briket menggunakan mesin *bio activator*, kemudian briket tersebut dapat dijual atau digunakan sendiri. Melalui program TOSS, Klungkung menjadi pelopor pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) skala industri pertama di Indonesia. <https://www.republika.co.id/>

## PROVINSI SUMATERA SELATAN

Beberapa daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki APBD terbesar, justru menjadi penyumbang angka kemiskinan tertinggi provinsi. Berdasarkan data BPS tahun 2020, daerah penyumbang angka kemiskinan terbesar di Provinsi Sumsel adalah Kab Musi Banyuasin (16,13 %), Kab Lahat (15,95 %), Kab Ogan Komering Ilir (14,73 %), Kab Muara Enim (12,32 %), Kota Palembang (10,89 %), Kab Musi Rawas Utara (19,47 %), Kota Pagaralam (9,07 persen).

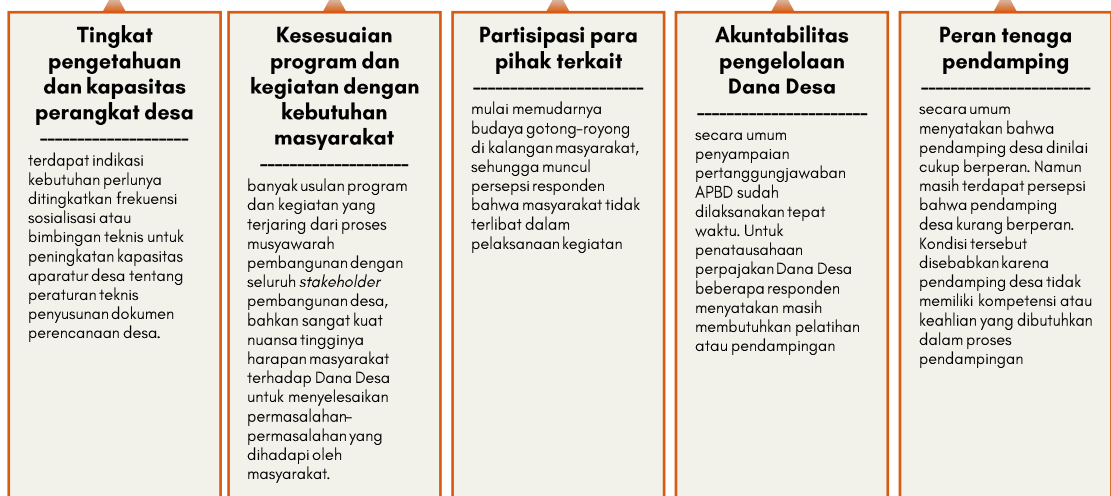
<https://www.merdeka.com>

# KAJIAN PILIHAN

## Analisis Efektivitas dan Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

**Kemiskinan** merupakan salah satu tantangan utama pembangunan ekonomi nasional. Dalam rilis BPS Maret 2019, 25,14 juta orang atau 9,41% penduduk Indonesia masih berada pada garis kemiskinan, dengan rata-rata pengeluaran perbulan dibawah Rp425,450. Apabila dilihat lebih mendalam, maka jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di daerah perdesaan sebesar 12,85%. Dana Desa menjadi salah satu tools yang dipergunakan untuk mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Kajian ini bertujuan untuk melakukan analisis dan evaluasi sejauh mana efektivitas Dana Desa maupun dampaknya dalam jangka pendek untuk mengatasi persoalan penyediaan infrastruktur di desa dan pemberdayaan masyarakat, serta tantangan yang dihadapi Pemda, Pemdes, dan masyarakat desa dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini mengambil sampel beberapa desa di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten yang meliputi: Kabupaten Cianjur, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Tangerang. Metodologi yang dilakukan adalah penelitian eksploratif yang akan dilakukan melalui *desk study*, *focus group discussion* dan *survey*.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat **lima faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Dana Desa**, antara lain:



Secara umum, beberapa **kendala dan permasalahan** yang ditemui dari hasil kunjungan lapangan ke daerah sampel serta diskusi dengan para responden dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1

#### Kendala Administrasi

Kendala ini menyangkut ketentuan-ketentuan administrasi yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa dan pengelolaan keuangan desa. Contoh dari kendala administrasi adalah bagaimana mengadministrasikan proses perencanaan, menatausahakan pelaksanaan kegiatan, dan menyusun dokumen laporan pertanggungjawaban

### 2

#### Kendala Birokrasi

Kendala birokrasi yaitu menyangkut pola hubungan antara pemerintah desa dengan institusi di level pemerintah daerah. Contohnya adalah persoalan pembinaan oleh Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, pola pengawasan oleh aparat pengendalian internal pemerintah, dan birokrasi pencairan dana oleh Bendahara Umum Daerah. Dalam beberapa kasus proses birokrasi sangat menyita waktu mengingat jarak yang cukup jauh antara desa dengan pusat pemerintahan daerah

### 3

#### Kendala Sumber Daya Manusia

Kendala ini berkaitan kapasitas aparat pemerintah desa maupun kapasitas aparat pemerintah desa, baik dari sisi kualitas aparat maupun kuantitasnya. Perangkat desa semestinya memiliki kombinasi kompetensi dan keahlian yang saling melengkapi sehingga menunjang pelaksanaan kegiatan dari Dana Desa

### 4

#### Kendala Regulasi

Termasuk dalam kendala ini adalah regulasi yang dianggap terlalu rumit dan rinci atau menyangkut juga regulasi yang dianggap kurang dapat diimplementasikan ataupun persoalan di lapangan yang belum diatur. Contohnya adalah regulasi tentang pengadaan barang dan jasa di desa, serta regulasi tentang standar biaya di desa

5. Kendala Kesadaran Masyarakat...

# KAJIAN PILIHAN

## 5

### Kendala Kesadaran Masyarakat

Partisipasi aktif dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa masih belum optimal. Kendala ini cukup menyulitkan aparaturnya ketika membutuhkan peran serta masyarakat yang bersifat sukarela atau gotong royong. Umumnya masyarakat berasumsi bahwa semua kegiatan pembangunan desa sudah dicukupi pendanaannya melalui Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat.

## 7

### Kendala Koordinasi

Kendala ini menyangkut kendala koordinasi di tingkat perencanaan, pelaksanaan maupun dalam tahapan laporan pertanggungjawaban. Koordinasi tersebut meliputi koordinasi antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat dan komponen masyarakat, serta dengan pemerintah daerah.

## 6

### Kendala Perencanaan

Kendala ini berupa terbatasnya kapasitas perangkat dalam mengelola proses perencanaan dan banyaknya kegiatan-kegiatan yang menjadi aspirasi dari masyarakat yang tidak seimbang dengan ketersediaan Dana Desa ataupun dana dalam APBDes.

## 8

### Kendala Teknis

Termasuk dalam kendala ini misalnya faktor cuaca, kondisi geografis, sulitnya akses transportasi, tingginya harga barang/material bangunan dan lain-lain. Kondisi alam yang ekstrim tidak jarang membuat biaya pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa menjadi mahal.

## ► Kendala Pelaksanaan Dana Desa di 4 Daerah Sampel

Daerah	Kendala							
	Administrasi	Birokrasi	SDM	Regulasi	Partisipasi	Perencanaan	Koordinasi	Teknis
Kab. Cianjur	2,22%	20,00%	6,67%	2,22%	8,89%	4,44%	4,44%	51,11%
Kab. Karawang	17,39%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	4,35%	-	51,17%
Kab. Kuningan	11,11%	5,56%	16,67%	16,67%	6,94%	13,89%	6,94%	22,22%
Kab. Tangerang	16,13%	-	19,35%	6,45%	3,23%	12,90%	12,90%	29,03%
<b>Total</b>	<b>11,56%</b>	<b>8,09%</b>	<b>13,87%</b>	<b>9,25%</b>	<b>6,94%</b>	<b>10,98%</b>	<b>6,36%</b>	<b>32,95%</b>

Agar Dana Desa dapat memberikan dampak yang lebih optimal, maka perlu dilakukan hal sebagai berikut:

1. Perlu dirumuskan kembali regulasi yang lebih jelas. Regulasi yang jelas sangat penting agar dapat menjadi acuan bagi aparaturnya pemerintah desa dalam implementasi kegiatan. Aturan yang jelas akan menghilangkan keragu-raguan perangkat desa dalam mengeksekusi kegiatan dan pada gilirannya akan memperjelas mekanisme pembinaan dan pengawasan.
2. Perlu diberikan ruang fleksibilitas yang lebih luas agar dapat meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, tentu saja tanpa mengesampingkan akuntabilitas.
3. Perlu pola penempatan tenaga pendamping yang memperhatikan kebutuhan dan karakteristik desa yang akan didampingi sehingga pendampingan dapat lebih optimal.
4. Perlu kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis untuk menambah pemahaman perangkat desa.

